

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh APIP belum seluruhnya dan belum dilaksanakan secara efektif. Saat ini APIP dinilai belum efektif melaksanakan pengawasan terkait pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan. Selain itu kapabilitas dan kompetensi di tubuh APIP sendiri dinilai masih belum memadai. Dengan kondisi ini cenderung APIP dianggap kurang kapabel dan kurang profesional dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
2. Upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensi APIP dituntut agar masyarakat merasakan keberadaan perannya yaitu dapat memberikan keyakinan yang memadai, memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. APIP perlu merancang kembali pengelolaan barang/aset yang menjadi acuan auditor ketika melakukan pemeriksaan reguler terhadap Inspektorat Kota Kupang. Meningkatkan pengelolaan terhadap aset sesuai dengan

bentuk-bentuk pemanfaatan. Perawatan terhadap peralatan harus ditingkatkan seperti penegeasan terhadap pemakaian peralatan dan melakukan pengecekan barang secara berkala. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu melakukan pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset.

2. APIP diharapkan meningkatkan pemahaman kepada Inspektorat dengan cara melakukan kegiatan pelatihan kantor sendiri, pendidikan dan pelatihan pengadaan barang atau jasa dan kegiatan sejenisnya yang dapat menambah keahlian auditor untuk menunjang pengawasan inspektorat dalam pengelolaan aset tetap. Dengan peningkatan kompetensi auditor, ke depan diharapkan peran inspektorat sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* dapat lebih efektif
3. Perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kupang dalam rangka peran APIP atas pengawasan aset tetap yang optimal. Inspektorat Kota Kupang diharapkan dapat mengurangi pemeriksaan reguler yang sifatnya korektif dan menambah kegiatan pengawasan yang sifatnya pembinaan ataupun preventif seperti reuiu, konsultasi, asistensi, dan sosialisasi. Pemeriksaan reguler hanya ditekankan pada objek pemeriksaan yang dirasa memiliki risiko cukup tinggi dengan mempertimbangkan sistem pengendalian intern audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Mahsyar A dan Malik I. 2019. *Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar*. JPPM: Journal of Public Policy and Management e-ISSN: 2715-2952 Vol.1 Nomor 2 | November, 2019.
- Basri, M. Bustan. 2017. *Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak*. Skripsi. FEB UNHAS Makassar.
- Basuki. 2000. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Karya Tulis Widyaiswara Pundiklat Pegawai BPK.
- Dita, Angga. 2015. *Pengawasan Internal Lemah Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1025234/149/pengawasan-internal-lemah-penyebab-kepala-daerah-korupsi> (diakses pada tanggal 14 juni 2021, 16:11:20).
- Hermawan, Rudy T. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Iek, Selpina. 2015. *Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Aset Tetap*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Inspektorat Daerah Provinsi NTT. 2021. *Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. <https://inspektorat.nttprov.go.id/visi-misi/> (diakses pada tanggal 03 Februari 2021, 13:51:09).
- Mariani M. Aliamin Dan Indriani M. 2018. *Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh)*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam, Economics And Business Faculty – Universitas Syiahkuala Aceh.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications
- Pemerintahan Kota Kupang. 2020. Peraturan Walikota Kupang Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah kota kupang.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (AKN) Badan Keahlian DPR RI. 2020. *Buku Ringkasan Terhadap LHT Atas LKPD Provinsi di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Berdasarkan IHPS I Tahun 2019*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Setiadi, Amos. 2018. *Strategi Implentasi Konsep waterfront City Kota Kupang*.Jurnal Teknik Arsitektur, Vol. 3, No. 1.Prodi Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siwi, Merry Ingrid. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Untuk Menunjang Tingkt Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*.E-Journal, Vol.17, NO.2. Universitas Samratulangi.
- Setiawan, Fitriani.2011.*Pengaruh Workload dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Kulitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi*.Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia vol.8-No.1 | Juni 2011.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah.